



PELAKSANAAN LITMAS PEMBINAAN AWAL NARAPIDANA DALAM RANGKA Mendukung Kebijakan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan

Bayu Tri Wahyudi, Ali Muhammad, Umar Anwar, Budi Priyatmono
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Pembinaan narapidana diberikan untuk dapat meningkatkan kemampuan dari setiap narapidana, sehingga ketika narapidana telah selesai menjalani masa pidana kemudian dapat bergabung kembali dengan masyarakat, untuk itulah pembinaan diberikan mulai dari narapidana mendapatkan putusan pengadilan, revitalisasi penyelenggaraan pemasarakatan ditukan untuk dapat mengoptimalkan kinerja pemasarakatan untuk mencapai tujuan dari pemasarakatan yakni membuat narapidana Kembali pada masyarakat. Penelitian ini ditujukan untuk dapat menjawab pertanyaan mengenai seperti apa proses pembuatan litmas pembinaan awal yang ada di Bapas Kelas II Bogor? dan apa saja kendala yang dihadapi oleh pembimbing kemasyarakatan dalam membuat litmas pembinaan awal. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data primer berupa wawancara dan observasi lapangan, maupun penelitian. Dari penelitian ini didapatkan bahwa proses pelaksanaan litmas pembinaan awal pada Bapas Kelas II Bogor sudah baik namun masih terdapat beberapa hal yang harus di perbaiki untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang maksimal.

Kata Kunci : Pembinaan Awal, Revitalisasi Pemasarakatan, Litmas.

PENDAHULUAN

Indonesia menggunakan sistem pemasarakatan dalam melakukan pembinaan kepada narapidana atau biasa disebut warga binaan pemasarakatan dimana kegiatan ini di dasarkan oleh suatu sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang tentunya bertujuan untuk menyadarkan seriap narapidana dari Tindakan pidana yang dilakukannya. Dengan demikian sistem pemasarakatan sendiri adalah upaya yang di lakukan dan disiaPKan dengan tujuan untuk dapat memberikan pembinaan kepada narapidana atau warga binaan pemasarakatan yang tentunya di dalam dirinya telah mengalami keretakan antara hubungan hidup, kehidupan dan penghidupannya. Dengan demikian melalui sistem pemasarakatan yang ada di Indonesia maka di haraPKan pembinaan yang diberikan dapat membuat warga binaan pemasarakatan berubah dan meyesali tindak pidananya sehingga

hubungan antara hidup, kehidupan dan penghidupannya akan dapat pulih dan diterima kembali di tengah tengah masyarakat.

Data yang ada pada SDP Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tanggal 6 maret 2021 terdapat 253.474 narapidana dan tahanan yang berada di seluruh unit pelayanan teknis pemasyarakatan yang ada di Indonesia, pada data yang ada seharusnya jumlah kapasitas dari seluruh unit pelayanan teknis pemasyarakatan di Indonesia hanya berjumlah sebanyak 135.704 penghuni, sehingga dapat dilihat bahwa kelebihan penghuni yang terjadi pada unit pelayanan teknis di seluruh Indonesia adalah sebanyak 117.770 penghuni atau sebanyak 87% lebih banyak dari kapasitas yang seharusnya (<http://smslap.ditjenpas.go.id>, 2021). Dari data tersebut maka dapat dilihat bahwa kelebihan penghuni pada unit pelayanan teknis pemasyarakatan di Indonesia cukup tinggi, tentunya ini akan dapat memicu adanya masalah akibat kelebihan kapasitas yang ada pada unit pemasyarakatan teknis pemasyarakatan di Indonesia. Masalah yang timbul akibat dari kelebihan penghuni ini mulai dari gangguan ketertiban dan juga proses pembinaan yang tidak berjalan dengan maksimal akibat dari kelebihan penghuni atau biasa disebut overcrowding.

Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami kelebihan penghuni tertinggi di Indonesia adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan, unit pelayanan teknis pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan sendiri memiliki kapasitas sebanyak 235 penghuni saja, namun pada realita yang ada di lapangan bahwa penghuni dari Lapas Kelas IIA Balikpapan berjumlah sebanyak 1429 narapidana dan tahanan, sehingga jika dihitung kelebihan penghuni dari kapasitas yang seharusnya pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan sebanyak 1194 penghuni atau sebanyak 611% kelebihan penghuni dari kapasitas yang seharusnya.

Pada penjara penjara yang ada di luar negeri sebagai contoh negara Islandia yang hanya memiliki 5 (lima) penjara saja di dalam negaranya dengan penghuni tidak lebih dari 200 narapidana yang berada di dalam setiap penjara di sana (*the conversation*, 2018), tentunya hal ini akan sangat berbeda mengenai cara negara islandia memperlakukan dan memberikan pembinaan kepada setiap narapidana yang ada di negaranya, fasilitas yang di dapatkan oleh narapidana di negara islandia mulai dari memiliki akses terhadap internet dan telepon genggam dengan adanya pembatasan. Pembinaan yang ada di negara tersebut juga jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia karena negara ini tidak mengalami kelebihan penghuni sehingga lebih mudah untuk memberikan pembinaan mulai dari perencanaan pembinaan hingga diberikannya pembinaan.

Tujuan dari sistem pemasyarakatan juga terhambat untuk dicapai karena masih kuatnya stigma dari masyarakat kepada orang orang yang pernah menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan, padahal pemidanaan di Indonesia menggunakan sistem pemasyarakatan yang memiliki tujuan untuk mengembalikan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan dari setiap orang yang menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia, namun kenyataan yang ada masyarakat di Indonesia masih mengidentikan pemasyarakatan sebagai penjara, sehingga Pemenjaraan pada dasarnya merupakan proses kriminalisasi dan stigma hingga seseorang makin mendalami kejahatannya serta identitasnya sebagai narapidana (Sulhin, 2018). Dengan demikian tradisi bahwa anggapan seseorang yang pernah menjalani masa pidana merupakan orang yang jahat dan tidak akan pernah bisa berubah, sehingga akibat dari stigma yang diberikan oleh masyarakat berdampak pada pada pola pikir yang dimiliki oleh

narapidana dimana setiap narapidana akan menganggap bahwa dirinya jahat dan tidak dapat diterima kembali di masyarakat, dengan pola pikir seperti itu maka akan sangat besar kemungkinan seorang narapidana melakukan pengulangan tindak pidana di kemudian hari.

Peran dari pembimbing kemasyarakatan dianggap penting karena pembimbing kemasyarakatan lah yang melakukan *assessment* maupun membuat penelitian kemasyarakatan untuk seluruh narapidana yang sedang menjalani masa pidananya, sikap professional harus dimiliki oleh setiap pembimbing kemasyarakatan, disamping itu juga setiap pembimbing kemasyarakatan harus memiliki kemampuan yang baik dan memenuhi kualifikasi yang ditentukan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. *Assessment* dan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh seorang pembimbing kemasyarakatan akan sangat mempengaruhi hasil dari pembinaan yang diberikan kepada masing masing narapidana, hal ini karena dari hasil *assessment* dan penelitian kemasyarakatan yang nantinya akan dijadikan dasar bagi Lapas untuk memberikan pembinaan. sehingga dengan demikian jika seorang pembimbing kemasyarakatan tidak professional dalam menjalankan tugasnya akan berdampak pada hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat termasuk hasil rekomendasi pembinaan awal yang diberikan kepada lapas untuk dijadikan dasar memberikan pembinaan. tentunya akhirnya akan dapat berpengaruh terhadap pembinaan yang diberikan dan perkembangan perubahan perilaku dari setiap narapidana. Maka dari itu posisi dari seorang pembimbing kemasyarakatan sangat penting untuk menentukan perubahan perilaku dari narapidana.

Ide mengenai revitalisasi penyelenggaraan pemsasyarakatan hadir dengan ibu Sri Puguh Budi Utami sebagai orang yang memiliki pemikiran mengenai revitalisasi penyelenggaraan pemsasyarakatan, pada ide tersebut revitalisasi penyelenggaraan pemsasyarakatan hadir dengan tujuan untuk dapat kembali mengoptimalkan kinerja dari pemsasyarakatan dalam memberikan pelayanan dan pembinaan yang ditujukan kepada setiap narapidana. Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemsasyarakatan untuk dapat merancang ulang mengani sistem pemsasyarakatan yang diberlakukan di Indonesia dengan mengedepankan pemsasyarakatan yang memiliki basis kopetensi, maksud dari pemsasyarakatan yang berbasis kopetensi sendiri adalah dengan setiap pembinaan yang diberikan kepada narapidana akan diberikan berdasarkan kebutuhan dan kopetensinya masing masing, sehingga setiap narapidana akan mendapatkan pembinaan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat risikonya, dimana pembinaan yang diberikan kepada narapidana korupsi akan berbeda dengan pembinaan yang diberikan kepada narapidana kasus pencurian, harapan yang akan dicapai adalah pembinaan yang diberikan kepada narapidana akan berdampak lebih efektif jika sesuai dengan kebutuhan dan tingkat risikonya masing masing

Dari semua penjelasan di atas harapannya adalah tingkat residivis di Indonesia akan menurun dengan tentunya memberikan pola pembinaan kepribadian dan kemandirian yang tepat untuk setiap narapidana. Namun masih ada hambatan untuk melaksanakan Litmas Pembinaan Awal ini, maka dari itu penulis akan melaksanakan penelitian mengenai pelaksanaan litmas pembinaan awal dalam rangka mendukung revitalisasi pemsasyarakatan.

Jika pada penelitian sebelumnya membahas mengenai pentingnya *assessment* risiko dan kebutuhan bagi narapidana, dimana manfaat dari *assessment* tersebut adalah sebagai salah satu pertimbangan dari usulan pembinaan yang akan diberikan kepada narapidana, sehingga narapidana akan dapat menerima pembinaan awal yang memang dibutuhkan oleh

dirinya. Selanjutnya dalam penelitian yang akan dilakukan pada kali ini akan lebih membahas mengenai bagaimana sebenarnya pelaksanaan pembuatan litmas pembinaan awal narapidana, kemudian dalam penelitian ini akan memandang prespektif bagaimana litmas pembinaan awal narapidana dapat mendukung kebijakan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan, sehingga dapat diketahui bagaimana litmas pembinaan awal narapidana tersebut dapat mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. Sehingga pembaharuan yang akan didapat dari penelitian yang akan dilaksanakan adalah bagaimana litmas pembinaan awal yang dibuat oleh PK akan mendukung kebijakan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Dari segala penjelasan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk dapat mengambil judul tentang "PELAKSANAAN LITMAS PEMBINAAN AWAL NARAPIDANA DALAM RANGKA Mendukung Kebijakan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan (STUDI KASUS PADA BAPAS KELAS II BOGOR"

RUMUSAN MASALAH

Peneliti tertarik untuk mengangkat judul ini karena peneliti beranggapan bahwa pembuatan Litmas Pembinaan Awal merupakan suatu hal yang penting dimana ketika seorang narapidana tidak diperhatikan mengenai pembinaan awal seperti apa yang diberikan maka akan dapat membuat tujuan dari sistem pemasyarakatan tidak terlaksana, maka peneliti memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembuatan Litmas Pembinaan Awal Pada Unit Pelayanan Teknis Bapas Kelas II Bogor?

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif, metode kualitatif adalah strategi penelitian yang menekankan pada kepada kata kata dan bukan kuantifikasi dalam pengumpulan dan analisis data (Bryman, 2012). Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dapat digunakan untuk mencari makna ataupun digunakan untuk dapat berfikir sehingga dapat menghasilkan teori teori besar maupun teori teori yang kecil, dari sisi lain peneliti memilih metode penelitian kualitatif karena peneliti menganggap bahwa metode penelitian kualitatif memiliki kelebihan mengenai kekayaan data yang berdasarkan sifatnya lebih kontadiksi, toleransi atas data dan spesifik data yang sifatnya ambigu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat memfokuskan suatu detail yang terjadi mengenai kehidupan manusia, dengan bersifat induktif maka penelitian ini bersifat emergent dimana adanya pola umum dari hal hal yang bersifat empiris menjadi suatu kesimpulan yang umum. Pada penelitian ini dibuat dengan strategi yang tidak terstruktur dimana tujuannya adalah untuk dapat memahami realitas sebenarnya yang terjadi pada subjek penelitian, dimana adanya data yang dihubungkan dengan setting individu yang melibatkan sebuah data yang bersifat pengamatan empiris menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Maka dari itu hubungan antara peneliti dengan objek atau subjek yang dijadikan penelitian tidak bebas untuk menilai

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Litmas Pembinaan Awal Pada Bapas Kelas II Bogor

Proses pelaksanaan litmas pembinaan awal tentunya pengaruhnya akan dirasakan oleh narapidana yang telah mendapatkan ketetapan pengadilan, sehingga dengan demikian pelayanan litmas pembinaan awal merupakan salah satu pelayanan publik yang diberikan kepada narapidana yang baru saja menjalani masa pidananya di Lapas/LPKA. Pelayanan publik sendiri merupakan salah satu tolak ukur suatu organisasi pemerintah telah bergerak pada arah reformasi birokrasi, ini dikarenakan arti dari pelayanan publik tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh negara untuk dapat menjamin terpenuhinya hak-hak dari setiap warga negara, pada pembahasan kali ini mengarah pada upaya pemenuhan hak-hak warga negara yang sedang menjalani masa pidana di Lapas/LPKA. Proses pembinaan awal merupakan salah satu hak dari narapidana yang sedang menjalani masa pidananya di dalam Lapas/LPKA sehingga dengan demikian untuk menunjang pemberian pembinaan awal maka harus dibuatkan litmas pembinaan awal, hal ini karena dengan litmas pembinaan awal maka pihak Lapas/LPKA akan melaksanakan rekomendasi pembinaan yang telah diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang sudah dilakukan..

Kualitas pelayanan publik sangat berpengaruh terhadap organisasi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik tersebut, persepsi masyarakat mengenai kualitas pelayanan publik sendiri akan dapat menentukan apakah pelayanan publik yang diselenggarakan telah berjalan dengan baik atau tidak. Rendahnya kualitas pelayanan publik pada penelitian mengenai litmas pembinaan awal mengarah pada beberapa aspek berikut: Pertama mengenai kepastian penyelesaian yang tidak pasti, sehingga narapidana tidak mendapatkan kepastian mengenai kapan dirinya mendapatkan hasil litmas pembinaan awal. Mekanisme proses litmas pembinaan awal yang terlalu rumit menyebabkan sering kali narapidana tidak mendapatkan litmas pembinaan awal, ketiga minimnya sarana prasarana yang tersedia pada organisasi tempat pelaksanaan pelayanan publik, sebagai contoh jumlah kendaraan dinas yang terbatas untuk menjangkau lokasi-lokasi terpencil, maupun ketersediaan alat-alat perkantoran untuk menunjang kinerja organisasi. Keempat kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dalam pelaksanaan pembuatan litmas.

Untuk dapat mengukur bagaimana kualitas litmas pembinaan awal yang dilaksanakan oleh Bapas Kelas II Bogor maka digunakan indikator sebagai alat ukur untuk menilai kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan organisasi pemerintah, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Ratminto & Winarsih (2005) dimana kualitas pelayanan mutu terdapat 5 dimensi yaitu (Sukmawati et al., 2020):

a. Bukti Langsung

Kualitas pelayanan pembuatan litmas pembinaan awal di Bapas Kelas II Bogor dilihat dari bukti langsung pada fasilitas Bapas yang masih mengalami keterbatasan, hal ini dapat dilihat dari hasil observasi peneliti pada tiga aspek yaitu: Pertama profil pelayanan yang tersedia di Bapas Kelas II Bogor, Kedua sarana dan prasarana yang tersedia pada Bapas Kelas II Bogor, dan ketiga kualitas pembimbing kemasyarakatan yang tersedia. Ketiga hal inilah yang dapat dijadikan bukti langsung terhadap kualitas pelayanan di Bapas Kelas II Bogor, dari ketiga aspek dari penilaian bukti langsung tersebut Bapas Kelas II Bogor telah memenuhi dua diantaranya yaitu mengenai profil pelayanan, dan yang kedua mengenai sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja pembimbing kemasyarakatan dalam

pelaksanaan pembuatan litmas pembinaan awal. Hal ini terlihat dari profil Bapas Kelas II Bogor yang telah berhasil melakukan sosialisasi mengenai bagaimana bapas bekerja melalui SOP yang dibuat untuk menunjang pelayanan Bapas termasuk pada SOP pembuatan litmas pembinaan awal pada Bapas Kelas II Bogor, kemudian pada sarana dan prasarana Bapas kelas II Bogor juga dapat dikatakan baik walaupun belum lengkap dan memadai untuk dapat melaksanakan pelayanan dengan maksimal.

b. Keandalan (*Reliability*)

Indikator kedua penilaian pelayanan publik mengenai litmas pembinaan awal yang ada pada Bapas Kelas II Bogor yakni mengenai keandalan dari petugas pelayanan yang ada pada kantor Bapas Kelas II Bogor, pembimbing kemasyarakatan merupakan petugas yang sangat berperan penting dalam pembuatan litmas pembinaan awal bagi narapidana, hal ini karena pembimbing kemasyarakatan merupakan petugas yang mencari data dan menyusun pembuatan litmas pembinaan awal untuk narapidana, aspek penilaian yang peneliti lihat adalah keandalan yang dimiliki oleh petugas dan standar pelayanan yang dimiliki oleh Bapas Kelas II Bogor.

Peneliti kemudian melakukan observasi mengenai bagaimana keandalan yang dimiliki oleh pembimbing kemasyarakatan dan juga bagaimana standar operasi yang diterapkan oleh Bapas. Dalam indikator penilaian keandalan ini maka peneliti memberikan penilaian sudah baik, hal ini dapat dinilai dari observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai bagaimana seorang pembimbing kemasyarakatan melakukan tugasnya untuk membuat litmas pembinaan awal, dimana selama melaksanakan observasi mengenai keandalan yang dimiliki pembimbing kemasyarakatan maka didapatkan hasil bahwa kemampuan seorang pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan wawancara dan menggali data sudah sangat baik, hal tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Firdaus:

“iyaaaa. Makanya kita wawancara itu bukan hanya ke klien saja. Kita wawancara itu bisa saja ketemennya yang satu blok atau tamping yang tau tentang dia atau pegawai yang memang sebagai walinya atau bagian keamanan. Jadi sebenarnya kita melakukan litmas bukan hanya satu orang saja, kita juga bertanya kepada petugasnya terkait klien kita ini bagaimana selama di lapas. Karena kita untuk mengetahui selama dia di dalam lapas kerjanya ngapain kan gitu. Apakah ada hukum disiplinnya atau tidak itu kan kita pasti harus bertanya kepada pegawai pegawai yang memang dibidangnya”

c. Daya Tangkap (*Responsiveness*)

Indikator penilaian kualitas pelayanan publik mengenai pelayanan pembuatan litmas pembinaan awal juga dapat dinilai dari indikator daya tangkap (*responsiveness*). Dalam menganalisis indikator daya tangkap maka peneliti mengobservasi mengenai seberapa sering terjadi komplain dari pelayanan terhadap litmas pembinaan awal, selain itu peneliti juga melihat bagaimana sikap petugas dalam merespon komplain yang masuk, pada indikator daya tangkap petugas mengenai pelayanan pembuatan litmas pembinaan awal yang dilaksanakan oleh Bapas Kelas II Bogor, peneliti memberikan nilai baik, hal ini dapat dilihat dengan sedikitnya komplain yang diberikan terhadap pelayanan litmas pembinaan awal yang dilaksanakan oleh Bapas Kelas II Bogor, kemudian respon petugas ketika terdapat komplain terhadap hasil litmas yang dibuat sangat baik.

Mekanisme pelayanan yang terdapat pada Bapas Kelas II Bogor sangat baik karena respon yang diberikan oleh seluruh petugas juga sangat baik mulai dari pelayanan yang ramah, sesuai aturan yang berlaku, dan bersikap profesional. Sehingga peneliti ketika melakukan observasi mengenai respons dari pelayanan yang diberikan oleh Bapas Kelas II Bogor dapat mengatakan sangat baik dalam memberikan respons untuk masyarakat maupun mitra dari Bapas. Setiap pembimbing kemasyarakatan melakukan litmas maka Bapas Kelas II Bogor sangat mementingkan aturan yang berlaku mulai dari standar pembuatan litmas, standar kearahasaan dari litmas, hingga standar pelayanan yang terus dijaga dengan baik. Hal ini terbukti ketika terdapat complain dari masyarakat maupun mitra bapas maka akan langsung dilakukan evaluasi dan perbaikan dari complain yang diberikan kepada bapas, sehingga ketika terdapat suatu pelayanan maupun kebijakan yang dianggap kurang maksimal dalam memberikan kualitas pelayanan bagi masyarakat akan langsung dilakukan evaluasi. Pada kantor Bapas Kelas II Bogor juga disediakan sarana untuk memberikan saran terhadap pelayanan yang diberikan oleh Bapas, sarana untuk memberikan saran ini berupa link untuk memberikan saran melalui *google form*, sehingga ketika terdapat saran dari pelayanan yang diberikan bapas akan dapat langsung ditindak lanjuti oleh pejabat struktural pada Bapas Kelas II Bogor.

d. Jaminan (Assurance)

Indikator penilaian kualitas pelayanan pembuatan litmas pembinaan awal pada Bapas Kelas II Bogor juga dapat dilihat dari indikator penilaian jaminan, pada indikator ini melihat kepastian yang diberikan dalam pelayanan yang diberikan oleh bapas, kepastian yang dimaksud adalah kepastian mengenai informasi yang diberikan dan kepastian waktu penyelesaian litmas pembinaan awal. Dari data data yang dikumpulkan oleh peneliti baik dari wawancara maupun observasi pada Bapas Kelas II Bogor dengan ditambah data yang didapatkan dari SDP Bapas maka peneliti dapat memberikan penilaian bahwa kualitas jaminan yang diberikan oleh bapas masih kurang dalam pelaksanaannya. Kejelasan mengenai waktu pengerjaan litmas pembinaan awal menjadi hal yang sulit untuk dikatui, hal ini sesuai dengan table 4.2.2 mengenai lama waktu penyelesaian litmas pembinaan awal yang ada pada Bapas Kelas II Bogor. Dalam tabel tersebut dapat diketahui bahwa dari 116 litmas pembinaan awal yang dilaksanakan oleh Bapas Kelas II Bogor, hanya terdapat 10 litmas pembinaan awal yang selesai sesuai dengan waktu yang seharusnya yaitu 7 hari masa kerja. Dengan demikian jaminan waktu penyelesaian litmas pembinaan awal tidak tercapai pada layanan litmas pembinaan awal yang dilaksanakan oleh bapas. dengan tidak adanya kepastian waktu mengenai litmas pembinaan awal maka tentunya akan berdampak pada pemberian pembinaan awal untuk narapidana. Pada pelaksanaannya memang terdapat kendala yang disampaikan oleh bapak firman:

“Kalau untuk sesuai atau tidaknya karena di Bapas bogor banyak permintaan jadi tidak terlalu sesuai dengan SOPnya, misalnya dia harusnya 7 hari, itu biasanya ga sampe 7 hari. Karena kita kan banyak permintaan litmasnya. Pembinaan awal itu kan Cuma menentukan dimana akan ditaronya, yang lebih urgent itu yang reintegrasi sama asimilasi mungkin.”

Kekurangan jumlah SDM merupakan masalah utama dari lamanya penyelesaian litmas pembinaan awal maupun litmas litmas lainnya pada Bapas Kelas II Bogor, dengan

tidak adanya kepastian waktu penyelesaian litmas pembinaan awal maka akan berdampak pada kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Bapas.

Kejelasan informasi menjadi salah satu hal baik dari indikator penilaian kaminan pada pelayanan publik yang diberikan oleh bapas. Hal ini dapat tercapai karena balai pemasyarakatan sering melaksanakan FGD maupun mengirimkan surat pemberitahuan mengenai mekanisme pelayanan yang diberikan oleh Bapas, pihak Lapas /Rutan tempat setiap narapidana yang menjalani awal masa pidana pun sangat mengerti dan paham seperti apa alur pembuatan litmas pembinaan awal sehingga koordinasi yang baik telah dibangun oleh Bapas Bogor kepada seluruh penerima layanan pada wilayah kerjanya.

e. Perhatian (*Emphaty*)

Indikator yang terakhir untuk dapat menilai kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan Bapas Kelas II Bogor mengenai pembuatan litmas pembinaan awal yaitu perhatian atau *emphaty* yang diberikan kepada masyarakat oleh petugas Bapas Kelas II Bogor berupa cara berkomunikasi maupun perhatian yang diberikan kepada klien, penilaian dari indikator perhatian ini adalah bagaimana seorang pembimbing kemasyarakatan dapat memperhatikan klien yang dimilikinya dan bagaimana seorang pembimbing kemasyarakatan mewawancarai klien dalam mencari informasi untuk membuat laporan litmas. Dan yang terakhir mengenai keramahan dan kesopanan petugas terhadap masyarakat.

Pada indikator perhatian peneliti melakukan observasi terhadap pelaksanaan wawancara yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan terhadap klien bapas yang akan dibuatkan litmas pembinaan awal, dari observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat dijelaskan bahwa cara pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan wawancara dengan klien sudah sangat baik, hal ini karena pembimbing kemasyarakatan yang melakukan wawancara kepada klien selalu bersikap humanis dan ramah, sehingga proses wawancara tidak berlangsung kaku, selain itu empati yang diperlihatkan oleh pembimbing kemasyarakatan juga sudah baik karena Ketika terdapat pertanyaan pertanyaan yang sensitif maka seorang pembimbing kemasyarakatan akan memutarakan pertanyaan sehingga klien yang menjawab pertanyaan tidak akan merasa tersinggung terhadap pertanyaan yang diberikan oleh PK, selain hal tersebut wujud empati yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan kepada klien adalah Ketika melakukan wawancara pembimbing kemasyarakatan akan secara fokus memperhatikan jawaban yang diberikan oleh klien sehingga klien merasa nyaman dan merasa didengarkan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Kemudian hal lain yang baik dalam aspek penilaian indikator perhatian adalah Ketika melaksanakan wawancara khususnya pada narapidana terorisme maka PK akan membawakan makanan sebagai salah satu cara agar narapidana merasa nyaman dan mau menjawab pertanyaan pertanyaan yang diberikan oleh PK. Sikap ramah dan humanis pembimbing kemasyarakatan sangat berpengaruh terhadap hasil wawancara dengan klien, karena Ketika klien merasa tidak nyaman dengan PK sudah pasti klien akan memberikan keterangan yang berbelit karena merasa tidak percaya dengan seorang PK.

1. Litmas Pembinaan Awal Sebagai Pendukung Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham dalam upaya untuk merevitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan yang belum berjalan maksimal, dengan adanya revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan maka diharapkan kinerja dari pemasyarakatan yang sebelumnya belum berjalan dengan baik sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Program pembinaan yang dilaksanakan oleh Lapas /LPKA belum berjalan dengan baik akibat dari overcrowding yang terjadi, bukan hanya membuat keadaan Lapas menjadi padat namun dampak overcrowding juga membuat pembinaan menjadi tidak berjalan karena tingkat risiko dari setiap narapidana belum sesuai dengan tingkatan tiap Lapas/LPKA, dengan adanya revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan maka setiap narapidana akan dapat ditempatkan sesuai dengan klasifikasi tingkat risiko, sehingga program pembinaan yang diberikan kepada narapidana akan lebih mudah untuk diberikan.

Pelaksanaan litmas pembinaan awal pada umumnya dibuat untuk dapat merekomendasikan pembinaan awal bagi narapidana, sehingga ketika narapidana diberikan pembinaan sesuai dengan kebutuhannya maka akan dapat lebih cepat untuk dapat memperbaiki keretakan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan seorang narapidana. Untuk itu litmas pembinaan awal merupakan salah satu hal yang mendukung kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan agar dapat berjalan baik.

Ketika seorang narapidana mendapatkan litmas pembinaan awal maka setiap narapidana otomatis akan mendapatkan pembinaan awal sesuai dengan yang dibutuhkan dan akan ditempatkan juga sesuai dengan kategori risiko dari narapidana.

Bapas Kelas II Bogor sendiri sudah sangat berupaya untuk memberikan hasil yang terbaik bagi kepentingan seluruh kliennya, litmas pembinaan awal pada bapas bogor paling banyak mengenai kasus terorisme, hal ini disebabkan karena pada narapidana teroris ketika akan dipindahkan tentunya harus memiliki litmas pembinaan awal yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan, hal ini karena penempatan narapidana teroris akan disesuaikan dengan tingkat risiko dari narapidana itu sendiri, apakah ditempatkan pada Lapas *super maximum security* atau pada lapas *maximum security*. Namun hal yang masih dirasa kurang dalam pelaksanaan litmas pembinaan awal khususnya pada narapidana terorisme tidak disertakan rekomendasi pembinaan, sehingga hal ini akan dapat menghambat proses pembinaan bagi narapidana terorisme, tentunya dengan demikian kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan belum berjalan maksimal jika masih terdapat hal yang kurang dalam pelaksanaannya.

Peneliti melaksanakan observasi terhadap pelaksanaan litmas pembinaan awal terhadap kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan dimana dengan dibuatnya litmas pembinaan awal maka narapidana yang masih belum ditempatkan pada Lapas sesuai dengan kategorinya maka akan dapat dengan segera dipindahkan ke Lapas yang sesuai dengan tingkat risikonya sehingga pembinaan akan segera diberikan, bagi narapidana narapidana khusus seperti kasus terorisme dalam memberikan pembinaan melibatkan pihak pihak lain seperti densus 88, BNPT dan Psikolog, hal ini diketahui berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Andy Budi selaku Kasubsie yantah pada Rutan Depok:

“untuk melaksanakan pembinaan awal khususnya pada narapidana dengan tindak pidana terorisme, maka keputusan pembinaan akan dilakukan dengan adanya koordinasi

dengan berbagai pihak mulai dari BNPT, Densus 88, Pamong dari Lapas, psikolog dan Pembimbing Kemasyarakatan”

Pada Intinya litmas pembinaan awal sudah sangat mendukung program pemerintah mengenai revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan dengan mengkategorikan narapidana sesuai dengan klasifikasi Lapas sesuai dengan tingkat risikonya, namun memang masih harus mendapatkan perbaikan agar semakin maksimal kinerja dari pemasyarakatan khususnya untuk dapat mencapai tujuan dari pemasyarakatan yaitu mengembalikan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang sempat retak dari diri narapidana sebagai dampak dari tindakan pidana yang dilakukan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil data yang didapatkan melalui hasil wawancara maupun observasi langsung di lapangan yang kemudian dilakukan analisis oleh peneliti maka didapatkan hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan litmas pembinaan awal yang terdapat pada Bapas Kelas II Bogor sudah berjalan baik, pelaksanaan litmas pembinaan awal sudah sesuai dengan SOP yang ada pada Bapas Kelas II Bogor sehingga secara administrasi pelaksanaan pembuatan litmas pembinaan awal yang dilaksanakan sudah baik, dari sisi lain litmas pembinaan awal yang dilaksanakan oleh Bapas Kelas II Bogor jika dilihat dari sisi pelayanan publik maka dapat dikatakan baik, hal ini karena dari lima aspek penilaian kualitas pelayanan publik Bapas Kelas II Bogor sudah mampu mendapatkan 4 aspek penilaian dengan hasil baik, sehingga hal yang masih harus mendapatkan perhatian adalah mengenai aspek jaminan, pada pelaksanaannya aspek jaminan masih belum terpenuhi dengan baik karena tidak ada kepastian berapa lama pembuatan litmas pembinaan awal dapat diselesaikan oleh Bapas Kelas II Bogor.

Pada aspek bukti langsung, keandalan, dan daya tangkap Bapas Kelas II Bogor telah memberikan pelayanan yang baik, fasilitas yang dimiliki oleh Bapas Kelas II Bogor sudah sangat lengkap untuk menunjang hasil kinerja dari pembimbing kemasyarakatan, pada aspek keandalan juga baik, hal ini dibuktikan dengan setiap PK yang ada pada Bapas Kelas II Bogor sudah sangat menguasai hal hal apa saja yang dapat dilakukan untuk mendapatkan informasi secara valid untuk dijadikan salah satu dasar pembuatan litmas pembinaan awal yang ada pada Bapas Kelas II Bogor, hal tersebut berupa cara wawancara yang dilakukan oleh setiap PK, maupun dokumen dokumen lain yang diteliti oleh PK untuk menambahkan informasi dari klien.

Pada aspek ketiga yakni aspek daya tangkap, Bapas kelas II Bogor juga sudah dapat mendapatkan nilai baik karena komplain yang ditujukan kepada Bapas Kelas II Bogor dapat dikatakan sedikit, kemudian jika terdapat komplain Bapas Kelas II Bogor juga selalu memberikan klarifikasi yang baik sehingga kualitas pelayanan dapat dikatakan baik.

Kemudian pada aspek perhatian, Bapas Kelas II Bogor dapat dikatakan sangat baik karena dalam pelaksanaan tugasnya setiap Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menunjukkan

sikap empati yang tinggi kepada setiap klien, sehingga klien dapat merasa nyaman dan memberikan jawaban yang sebenarnya kepada PK.

1. Kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas Kelas II Bogor yaitu:

- a. Kopetensi dari pembimbing kemasyarakatan pada Bapas Kelas II Bogor masih belum sama

Kopetensi yang dimaksud adalah kemampuan baik secara teori maupun kemampuan pada pelaksanaan pembuatan litmas di lapangan masih belum sama antara setiap PK, hal ini dikarenakan masih minimnya penyamaan kopetensi untuk para PK agar memiliki kemampuan yang sama.

- b. Prosedur Analisa dan Evaluasi yang terlalu banyak yaitu 3 kali Analisa dan Evaluasi

Proses Analisa dan evaluasi yang terlalu banyak menyebabkan sering kali penyelesaian litmas pembinaan awal maupun litmas lainnya mengalami keterlambatan yang dikarenakan terlalu banyaknya proses Analisa dan Evaluasi sebelum litmas di tanda tangani oleh Kepala Bapas Kelas II Bogor

- c. kurangnya dokumen dari setiap narapidana yang diajukan permintaan litmas pembinaan awal

dokumen yang biasanya hilang atau terselip yaitu berupa BAP penyidik maupun hasil petikan putusan pengadilan, tentunya dengan tidak adanya dokumen tersebut seorang pembimbing kemasyarakatan akan mengalami kendala dalam mendapatkan informasi pembanding dari wawancara yang dilakukan kepada klien masyarakat.

- d. Kendala teknis yang membuat proses wawancara menjadi kurang maksimal

Kendala teknis yang sangat mendominasi terjadinya kendala dalam proses wawancara secara daring yaitu seperti kendala jaringan, kendala *device* baik komputer maupun headset/speaker.

Saran

Pada penelitian kali ini peneliti memiliki saran sebagai berikut:

1. Ketidak samaan kopetensi dari pembimbing kemasyarakatan pada Bapas Kelas II Bogor seharusnya menjadi atensi bagi pejabat struktural yang ada, sehingga peneliti menyarankan agar ketika terdapat pelatihan untuk menambah kopetensi PK pada Bapas Kelas II Bogor, maka seluruh PK wajib mengikuti kegiatan tersebut, namun jika terdapat PK yang berhalangan hadir maka pejabat struktural dapat memfasilitasi hal tersebut dengan merekam atau membuat resume kegiatan pelatihan, sehingga PK yang berhalangan hadir juga akan tetap mendapatkan isi pelatihan dan meningkatkan kopetensi PK tersebut.
2. Pejabat struktural pada Bapas Kelas II Bogor harus selalu mengontrol kinerja PK mengenai penyelesaian litmas yang dibuat, sehingga ketika terjadi penyelesaian litmas pembinaan awal yang terlalu lama melewati waktu pengerjaan litmas yang seharusnya langsung diberikan tindakan baik teguran secara lisan maupun tulisan.

3. Harus segera dilaksanakan evaluasi terhadap SOP yang ada pada saat ini, termasuk evaluasi terhadap proses Anev yang sering kali membuat adanya keterlambatan dalam penyelesaian pembuatan Litmas.
4. Pejabat struktural seharusnya sering melaksanakan koordinasi dengan penegak hukum lain, mulai dari kejaksaan, kepolisian, pengadilan, dan Lapas/ Rutan. Hal ini untuk menyelesaikan permasalahan kurangnya dokumen dari WBP.\
5. Koordinasi harus antara kepala Lapas/Rutan dengan Kepala Bapas Kelas II Bogor mengenai kendala teknis yang sering terjadi ketika melaksanakan wawancara untuk membuat litmas.

DAFTAR BACAAN

Bryman, A. (2012). Social Reaserch Methods. In *Journal of Materials Processing Technology* (Issue 4th).

Sulhin, I. (2018). *Diskontinuitas Penologi Punitif Sebuah Analisis Genealogis Terhadap pemenjaraan* (2nd ed.). Kencana.

Sukmawati, S., Rijal, R., & Iriawan, H. (2020). Kualitas Pelayanan Pembuatan Paspor pada Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi Biak. *Matra Pembaruan*, 4(1), 37-46. <https://doi.org/10.21787/mp.4.1.2020.37-46>

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan